

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman (Editor), *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. (Jakarta: Media Sarana Press, 1987).
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
- Budiono, Bambang, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Renika, 2002).
- Busroh, Abu Daud dan Abu Bakar, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Busroh, Abu Daud, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- Gie, Liang, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Jilid II*, (Yogyakarta: Liberty, 1968).
- Haris, Syamsuddin (Editor), *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI*. (Jakarta: LIPI Press, 2004).
- Huda, Ni'Matul, *Problematisa Pembatalan Peraturan Daerah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991).
- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Isjwara, Fred, *Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung: Bina Cipta, 1974).
- Manan, Bagir dan Kutana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata negara Indonesia*. Edisi Revisi, (Bandung: Alumni, 1997).
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, 2005).

- Murti, Krisna D. Murti, *Otonomi Daerah. Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- Noerdin, Achmad, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990).
- Solekhan, Moch, MAP, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014)
- Suprpto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Jakarta: Kanisius, 1998).
- Suseno, Franz Magni, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).
- Syarif, Amiroedin, *Perundang-undangan; Dasar, Jenis dan Teknik Pembuatan*, (Jakarta Gramedia Pustaka, 2006).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)*
- _____. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495)*
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123)*
- _____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1223)*

_____. *Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1)*

C. Internet

Anonim. “Kemendagri Sudah Cabut Hapir 3.000 Peraturan Daerah”
<https://www.antaranews.com/berita/567136/kemendagri-sudah-cabut-hampir-3000-peraturan-daerah>

D. Kamus

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990).

E. Makalah

Aziz, Machmud, “Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan”, *Makalah*, disampaikan pada acara Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, diselenggarakan oleh *Australian Legal Resources International (ALRI)* bekerja sama dengan Departemen Kehakiman dan HAM, serta DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Palu, 3 Juni 2002 s/d 5 Juni 2002.